



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU
(1966-1998)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RAJA ILHAM NUR ARIF
NIM : 11724102855

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/ 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIOH SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966 1998)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Raja Ilham Nur Arif
 NIM : 11724102855
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Ramadhan 1442 H
 21 April 2021 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF**

SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966-1998)

” yang ditulis oleh :

Nama : **RAJA ILHAM NUR ARIF**
 NIM : 11724102855
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa , 8 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Sekretaris

H. Syamsudin Muir, Lc, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Suhaib, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIM. 19741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Raja Ilham Nur Arif (2021): *Hegemoni Barat Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Historis Politik Era Orde Baru (1966-1998)*

Judul Skripsi ini adalah “Hegemoni Barat Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Historis Politik Era Orde Baru (1966-1998)” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Pengaruh Hegemoni Barat dalam Historis Politik di Indonesia Era Orde Baru dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengaruh Hegemoni Barat Dalam Historis Politik Indonesia Era Orde Baru.

Di dalam orde baru ditemukan adanya pengaruh hegemoni barat. Konsep hegemoninya pun telah cocok bila dibandingkan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci dan lagipula pengaruh ini sangat terasa bagi masyarakat terlebih lagi bila ditinjau dari segi fiqh maka telah melanggar kaidah fiqh sehingga hal itulah yang menjadi permasalahan yang penting untuk kedepannya demi kemaslahatan umum.

Sumber data yang penulis gunakan adalah dari sumber data sekunder yaitu dari buku-buku sejarah dan buku-buku yang berkaitan akan hal itu yang telah ditelaah dan dianalisis maka penulis jadikan sumber data sekunder ini menjadi sumber data primer.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek dilapangannya barat telah melakukan hegemoninya terhadap Indonesia pada masa orde baru seperti pemulihan hubungan dengan Negara barat, depolitisasi Indonesia dan azas tunggal Pancasila, itu berdampak dan berpengaruh bagi Indonesia dengan masuknya budaya asing, dibungkamnya masyarakat dan penyerdehanaan partai. Dan dari hasil tersebut cocok dengan teori hegemoni dan telah melanggar salah satu kaidah fiqh yaitu di mana pemimpin tersebut harus membuat kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Orde Baru, Hegemoni Barat, Fiqh Siyasah

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
له, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul "HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966-1998)" Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Sugi Harsono dan ibunda Elvi Nuraini.,S.Pd.Sd yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, yang semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor UIN SUSKA Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M. Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Drs. H. Promaddi, MA, Ph.D sebagai Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II dan Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III
4. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA. dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau atas peminjaman buku sebagai referensi penulis
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan dalam dakwah kampus seperti Forum Kajian Mahasiswa Syariah dan Hukum, tempat penulis menimba ilmu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengalaman dari para senior dan teman-teman dalam mengembangkan dakwah di kampus dan menebar kebaikan

8. Guru-Guru dan Sahabat-Sahabat seperjuangan dalam Majelis Jannatul ‘Ilmi yang telah memberikan penulis ilmu agama. Dan tetap memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap setia istiqomah didalam menimba ilmu agama
9. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2017, terkhusus Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas HTNS.C, di mana teman-teman kelas HTNC pernah mengamanahkan penulis menjadi Kosma kelas HTNS.C pada tahun 2018-2019, dari situlah penulis mulai belajar banyak menjadi pemimpin dan mendapatkan pengalaman saat memimpin serta dorongan dan masukan teman-teman kelas HTNS.C yang tidak pernah penulis lupakan hingga saat ini. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Sahabat sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat seperti Muhammad Syamsul Aidy, Zedri Romanda, Kasuma Indra Suryawan, Julheri Pradana, Berri Parma, Syahril Anwar, Dedy Gunawan, Rifan Nurfala, Khairun Nizam, Yulia Nur Khalifah, Masitha Nur Rohimah, Rinny Nurhayati, Ratu Miranda, Siti Hawa, Nurul Annisa, Nur Aisyah, Raudatul Jannah, Mardiani Harahap, Nahdia Dulsan, NamiraFetyZahra, Rahimi Sadiah, Herma Yunita, Fikriatun Nisa, Dian Agustia, Juliani Syafitri, Ulfa Luthfiani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 12 April 2021
Penyusun

Raja Ilham Nur Arif
NIM: 11724102855

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS: SEJARAH ORDE BARU	24
A. Pengertian Orde Baru	24
B. Sistem Pemerintahan Orde Baru	26
C. Tujuan dan Ciri-Ciri Orde Baru	27
BAB III PERADABAN BARAT, OLIGARKI DAN, SIYASAH DAULIYAH	30
A. Peradaban Barat	30
B. Oligarki	46
C. Pengertian Siyash Dauliyah	49
BAB IV PEMBAHASAN	67
A. Pengaruh Hegemoni Barat Di Dalam Historis Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru	67
B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pengaruh Hegemoni Dalam Historis Politik Indonesia Era Orde Baru	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Syed Muhammad Naquib Al-Attas seorang pemikir yang dikenal cukup baik oleh dunia pemikiran Barat maupun Islam memberikan pandangan tentang Barat seperti yang dikutip oleh Adian Husaini di dalam bukunya, memandang problem terberat yang dihadapi manusia dewasa ini adalah hegemoni dan dominasi keilmuan sekular Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Menurut beliau, bagi Barat, kebenaran fundamental dari agama dipandang sekedar teoritis. Kebenaran absolut dinegasikan dan nilai-nilai relatif diterima. Tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya, adalah penegasian Tuhan dan Akhirat dan menempatkan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dituhankan dan Tuhan pun dimanusiakan. Berbagai problem kemanusiaan muncul sebagai hasil dari kacaunya nilai-nilai.¹

Berbicara mengenai hegemoni barat sejatinya tidak lepas dari peristiwa perang dingin dimana kedua negara barat yaitu Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika Serikat dengan demokrasi dan kapitalismenya serta sekuler liberalnya. Namun perang dingin ini tidak

¹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunkan kekuatan militer akan tetapi menggunakan persaingan politik, ekonomi dan propagandanya.

Secara umum, sekurang-kurangnya ada empat strategi yang dilakukan Barat dengan kepemimpinan AS -untuk menaklukkan dunia Islam atau negara-negara Islam (berpenduduk mayoritas Muslim).:²

1. Menciptakan kondisi ketergantungan. Program bantuan luar negeri (*foreign aid*), seperti bantuan ekonomi, tenaga ahli, militer, dan pemberian pinjaman (utang luar negeri), yang mengalir deras dari negara-negara Barat ke negara-negara Islam, merupakan bagian dari penciptaan kondisi ketergantungan itu. Dengan "ikatan" bantuan tersebut Barat dapat mengendalikan kebijakan Negara-negara penerima bantuan atau pinjamannya, atau paling tidak "menguasa" elite-elite politiknya agar melayani kepentingan mereka atau minimal tidak memusuhi mereka.
2. Penanaman rasa permusuhan dan saling curiga di antara Negara-Negara Islam (politik pecah belah, *devide et impera*). Persatuan umat Islam adalah hantu menakutkan bagi Barat. Karenanya, Barat terus berupaya agar umat Islam bermusuhan dan berpecah-belah bahkan bila perlu berperang satu sama lain.
3. Pencegahan program persenjataan nuklir di negara-negara Islam, tidak saja untuk melanggengkan supremasi Barat dalam

² Asep Syamsul M. Romly, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persenjataan nuklir, tapi juga agar negara negara Islam lemah secara militer. Barat bereaksi keras jika ada Negara Islam yang memprogram pengembangan kemampuan nuklirnya

4. Peredaman dan pembasmian "kekuatan Islam", khususnya gerakan-gerakan Islam (harakah Islamiyah) yang merupakan oposisi terdepan terhadap hegemoni Barat. Terlebih, harakah Islamiyah yang berjuang demi tegaknya syariat Islam di dunia ini, umumnya berkarakter anti-Barat atau anti-AS. Barat habis-habisan membantu Israel menumpas Hamas dan Jihad Islam di Palestina serta Hizbullah di Lebanon.

Strategi ini juga dilaksanakan dengan taktik menciptakan dan mendukung pemerintahan tirani, diktator, dan otoriter di negara-negara Muslim. Tiranisme, diktatorianisme, dan otoriterianisme yang dalam kamus Barat merupakan musuh demokrasi itu, diberlakukan jika sebuah rezim atau penguasa di negara Muslim "bersahabat" dengan Barat dan memusuhi gerakan-gerakan Islam. Demokrasi atau demokratisasi yang menjadi jargon Barat selama ini, hanya berlaku di sebuah negara jika hal itu menguntungkan mereka atau tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Demokrasi tidak berlaku di dunia Islam jika ternyata hanya memunculkan kekuatan Islam atau melahirkan sebuah pemerintahan Islam. Sebaliknya, kediktatoran yang mampu memelihara kepentingan Barat harus didukung.³

³ *Ibid*, hal: 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum penulis masuk kedalam hegemoni barat di dalam kekuasaan, maka penulis akan uraikan politik secara umum. Salah satu usaha untuk memperjelas sosok ilmu politik, Seperti yang dikutip Muhtar Haboddin & Muh Arjul didalam bukunya yang menutip pernyataan Lisa Harrison tentang ilmu politik adalah dengan cara mencoba menjauhi istilah ‘studi politik’ (*political studies*), dan lebih memilih penggunaan istilah “ilmu politik” (*political science*) Penggunaan istilah *political science* akan terlihat bila orang mengadopsi pendekatan minimalis, yang mengatakan bahwa *political science* adalah ilmu dalam arti ia dapat menyodorkan pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan sistematis. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan untuk meragukan bahwa *political science* dalam keseluruhan bentuknya dapat mencapai tingkat pengetahuan seperti itu. Pemahaman ini diperkuat Brenden O’Leary, yang mengatakan *political science* adalah suatu disiplin akademis, dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisa, dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan.⁴

Dari penjelasan singkat di atas bisa disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan salah satu ilmu karena telah memenuhi sederetan syarat ilmiah. Sebagai satu ilmu, ilmu politik tidak saja dituntut untuk menunjukkan keteraturan proposisi yang dibangun

⁴ Muhtar Haboddin & Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Universitas Bravijaya Press (UB Press), 2016), hal: 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjelaskan satu fenomena, tetapi lebih dari itu dituntut untuk dapat membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi kalau sederetan kondisi terpenuhi.⁵

Di dalam ilmu politik ada 3 (tiga) fokus utama yaitu: Negara, Kekuasaan, Kebijakan⁶ Baiklah karena hegemoni barat fokus utamanya adalah mengenai kekuasaan dan kebijakan, mengapa kedua hal ini penulis katakan? Karena bila sudah dikuasai dan dominasi kekuasaan di suatu Negara maka kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih mudah dikontrol dan dipengaruhi. Jadi kunci didalam fokus utama diatas adalah didalam pemikiran politik yang diterapkan, bila sebuah pemikiran politik telah disusupi maka itu akan mempengaruhi sistem didalam ketatanegaraan sehingga dengan lebih mudah menguasai kekuasaan dan kebijakan.

Untuk menelisik hegemoni barat di Indonesia dapat dikemukakan dahulu fakta-faktanya sebelum masuknya era orde baru:

1. Pada awal tahun enam puluhan, kata Indonesia adalah merupakan kata-kata kotor bagi perkembangan dunia kapitalisme. Pengambil-alihan perusahaan swasta oleh Negara Indonesia, penyitaan dan nasionalisme merajalela, menyebabkan para ekonom liberal dan para pengusaha sama-sama takut bahwa dongeng semua kekayaan di Hindia Timur - sawit, karet dan timah - akan hilang diambil

⁵ *Ibid*, hal: 12

⁶ *Ibid*, hal: 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekarno yang berapi-api dan dua puluh juta pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berorientasi ke Peking. Kemudian, pada bulan Oktober 1965, para jenderal militer Indonesia masuk mengarahkan pembalasan mereka terhadap kudeta kolonel yang gagal, menjadi program anti-komunis, dan membuka kesempatan eksploitasi sumber daya alam negara Indonesia yang luas secara penuh oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Setelah itu, pada 1967, Presiden Amerika Richard Nixon menggambarkan Indonesia sebagai satu "hadiah terbesar di kawasan Asia Tenggara." Jika Vietnam telah menjadi lahan kekalahan utama pasca perang bagi sebuah perluasan imperialism Amerika, maka pembalikan haluan (politik) di Indonesia yang merupakan tetangga dekat Vietnam, adalah kemenangan tunggal terbesar. Tak perlu dikatakan, para jenderal rezim militer Indonesia-lah yang memberikan sebagian besar sahamnya untuk kesuksesan Amerika itu. Tapi yang berdiri di sisi mereka, dan yang memberikan saham jangka panjang yang sangat besar dan luar biasa adalah tim ekonom Indonesia, mereka semuanya dididik di Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi 20 tahun yang disponsori oleh lembaga bantuan beasiswa swasta yang paling kuat dunia, yang disokong dana miliaran dolar dari Ford Foundation.⁷

⁷ Ahmad Yanuana Samantho, *Sejarah Jaringan Konspirasi Kejahatan Internasional Freemasonry Di Asia*, (Bogor: Bayt al Hikmah Institute Bogor, 2017) hal: 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tentu saja langkah Soekarno membuat Barat semakin gerah. Mercka mencari cara agar Soekarno bisa digulingkan. Menggulingkan Soekarno secara terang-terangan jelas tidak mungkin. Barat tahu Soekarno merupakan presiden yang populer di kalangan rakyat, yang setiap pidato-pidatonya selalu dihadiri puluhan ribu rakyat. Sehingga, bila secara terang-terangan yang ditempuh untuk menggulingkan Soekarno tentu akan banyak risiko dan harga yang harus dibayar oleh Barat. Maka, sebagai jalan keluar mereka melakukan kerja-kerja konspirasi untuk menggulingkan Soekarno. Kerja-kerja konspirasi tentu membutuhkan agen-agen intelijen yang andal. Mereka selain memiliki militansi juga harus cerdas agar bisa menghadapi situasi apa pun. Nah, salah satu yang menjadi agen CIA adalah Pater Beek.⁸
3. Sebelum orde lama berakhir, Indonesia dikejutkan oleh kudeta gagal yang dilakukan oleh komunis "Sebuah kudeta komunis yang gagal pada tahun 1965 menyebabkan pengambilalihan anti-Komunis oleh militer, di bawah pimpinan Jenderal Suharto."⁹ Tapi sebenarnya jauh lebih kompleks. Sebuah indikator persuasif untuk ini terletak pada item berikut, dikutip dalam sebuah artikel yang luar biasa yang ditulis oleh Peter Dale Scott yang diterbitkan dalam

⁸ M. Sembodo, *Pater Beek, Freemason dan CIA*, (Galan, 2009), hal: 30

⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal Inggris Lobster. Scott mengutip seorang penulis yang mengutip seorang peneliti yang, karena telah diberikan akses ke file dari kementerian luar negeri di Pakistan, ada sebuah surat keluar dari seorang mantan duta besar yang melaporkan percakapan seorang perwira intelijen Belanda dengan NATO, yang mengatakan, menurut catatan peneliti, *"Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat seperti sebuah apel busuk." Badan-badan intelijen Barat, kata dia, akan mengorganisir sebuah kudeta "komunis premature yang akan ditakdirkan untuk gagal, memberikan kesempatan yang sah dan selamat datang kepada tentara untuk menghancurkan komunis dan membuat Soekarno tawanan niat baik tentara." Laporan duta. bertanggal Desember 1964.*¹⁰

Setelah penulis menelisik masuknya hegemoni barat ke Indonesia, maka penulis akan mengembangkan corak pemikiran politik di era orde baru. Corak pemikiran orde baru disini adalah sebuah pemikiran Oligarki, dimana oligarki menurut Jeffrey Winter definisi oligarki secara umum dapat dimaknai sebagai sistem kekuasaan yang dijalankan atau dikendalikan oleh golongan atau pihak yang diatur dengan tujuan kepentingan golongan itu sendiri.

Sejak saat itu strategi sosial, politik, dan ekonomi yang dibangun oleh negara-negara kapitalis mulai diterapkan rezim orba. ini tercermin dalam undang-undang no. 2 tahun 1986 mengenai

¹⁰ Ahmad Yanuana Samantho, *op cit*, hal: 285-286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanaman modal asing. untuk merealisasikan itu rezim soeharto melakukan strategi pengamanan yang sering kali malah merugikan bangsa sendiri seperti kebijakan eksplorasi tambang di papua oleh free port dan juga eksplorasi tambang di NTB oleh perusahaan New Mont. semua skenario ini ditopang oleh para intelektual dan ekonom yang di sekolahkan di amerika yang bekerjasama untuk mengeksplorasi segala kekayaan alam indonesia. Segala bentuk kekerasan dan otoriter rezim orde baru dibuktikan dengan pembunuhan dan pembantaian orang-orang bekas PKI di bunuh peristiwa berdarah ini merenggut hampir 450.000 orang.¹¹ Dan segala penculikan terhadap para aktivis mahasiswa yang dilakukan di jaman orde baru, serta pembredelan sejumlah surat kabar rakyat dan juga surat kabar di kampus ini membuktikan betapa penguasa orde baru yang sangat fasis dan juga otoriter membuat kesadaran masyarakat indonesia terutama kaum intelektual untuk melakukan aksi massa besar-besaran bersama dengan para dosen, para aktivis masyarakat, dan para elit politik yang ingin melengserkan rezim orba. Setelah terjadinya konsolidasi massa revolusi ini kemudian melakukan aksi sosial seperti menulis buku, menulis berita di media massa, demonstrasi, dan penekanan yang ekstrim kepada pemerintah. Setelah menduduki gedung DPR akhirnya rezim orde baru lengser dan digantikan oleh kaum

¹¹ https://www.kompasiana.com/sosialis/hegemoni-orde-baru-dan-dinamika-konflik-di-era-reformasi_54f7101da333112a238b476f (diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul. 10:00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

revolusioner yang menginginkan demokrasi yang benar-benar bebas adil dan berdaulat.¹²

Dari kasus di atas serta dihubungkan dengan teori hegemoni oleh antonio gramsci yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk pengaruh hegemoni adalah penguasaan kesadaran melalui jalan kekerasan dan pemaksaan. Kondisi ini memang benar terjadi di masa orba bahwa masyarakat dibungkam oleh kekerasan, kritik dan pendapat masyarakat yang sekira dapat membahayakan orde baru langsung disingkirkan dan dimusnahkan dengan cara kekerasan terbukti dengan pembantaian orang-orang yang bekas PKI, mahasiswa yang kritis pun diculik dan dimasukkan ke penjara.¹³ cara kekerasan membuat masyarakat dan para aktivis menjadi takut untuk mengkritik rezim orde baru yang sangat otoriter. Selain itu elemen masyarakat pada masa orde baru masyarakat dituntut untuk patuh oleh agenda dan kebijakan pemerintah misalnya tentang penanaman modal asing yang ada di Indonesia jelas-jelas kebijakan itu sangat merugikan bangsa ini akan tetapi masyarakat Indonesia seolah-olah masih sangat normatif dan menerima semua kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa menelaah terlebih dahulu.¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan *eugemonia* sebagaimana yang dikemukakan oleh Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh Negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh Negara kota Athena dan Sparta, terhadap Negara-negara lain yang sejajar.¹⁵

Dalam pengertian di zaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu Negara tertentu yang bukan hanya sebuah Negara-neegara lain yang juga berhubungan secara longgar maupun ketat terintegrasi dalam Negara “pemimpin”.¹⁶

Konsep hegemoni dikemukakan oleh Gramsci mengacu kepada totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep yaitu: *kepemimpinan (direction)* dan *dominasi (dominance)*. Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal. *Pertama*, dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. *Kedua*, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menakhlikkan apparatus Negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, yang *Ketiga*, adalah mengenai kekuasaan, dimana kekuasaan Negara dapat tercapai, bila dua aspek supremasi diatas seperti dominan dan

¹⁵ Antonio Gramsci, *Sejarah dan Budaya*, Terj. Ira Puspitonni (Yogyakarta: Narasi, 2007) hal: 115

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan maka hal itu terus berlanjut dilakukan kekuasaan dan hegemoninya.¹⁷

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan penindasan terhadap klas sosial lainnya. Ada beberapa cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur yang kognitif dari masyarakat. Karena pada dasarnya hakekat hegemoni itu adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang sudah ditentukan.¹⁸

Ketika hegemoni terancam oleh kekuatan politik yang memerintah sedang terancam dan mengalami perpecahan. Kemungkinan terdapat suatu periode ketidakstabilan dan transisi yang sangat panjang, sehingga sistem aliansi yang menjadi dasar hegemoni dari kelompok yang berkuasa harus melakukan perubahan-perubahan yang berskala luas dalam suatu proses restrukturisasi jika hegemoni itu hendak dipertahankan.¹⁹

¹⁷ Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal: 118

¹⁸ Antonio Gramsci, *op cit*, hal: 120-121

¹⁹ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik*, Terj. Kamdani & Imam Baehaqi (Yogyakarta: Insist, 1999), hal: 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi seperti ini disinyalir Allah didalam Al-Qur'an Surah An-Nur

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥ سورة النور ٥٥

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik [An Nur55]²⁰

Firman Allah tentang kekuasaan itu menunjukkan betapa barat telah menghegemoni sendi kehidupan tidak terkecuali kekuasaan di suatu Negara walaupun secara massif dengan menempatkan boneka-bonekanya saja yang telah didoktrin sebelumnya.

Di dalam fiqh siyasah, pembahasan ini termasuk kedalam siyasah *dauliyah*, yang membahas mengenai kekuasaan, wewenang. Mengapa kekuasaan sangat penting dibahas didalam siyasah? Bila mereka berhasil menempati orang-orangnya didalam posisi penting maka itu akan mempengaruhi kebijakan yang diambilnya. Kebijakan didalam siyasah termasuk siyasah dusturiyah.

²⁰ Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30* (Bandung: Sinar Baru Alensindo, 2015), hal: 498

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fakta-fakta dan narasi di atas, bahwasanya Barat telah melakukan hegemoninya terhadap Indonesia dengan dipaparkannya 4 (empat) strategi diatas setidaknya ada 2 (dua) strategi yang tengah dijalankan pada masa orde baru yaitu menciptakan kondisi ketergantungan dengan memberikan pinjaman ekonomi dan militer ke Negara yang ditarget dan peredaman pembasmian terhadap kekuatan Islam, dimana organisasi Islam dan umat Islam yang sangat anti kepada Barat dan AS diredamnya, dari kedua strategi yang dilancarkan ini mereka menggunakan pemerintahan dan kekuasaan otoriter, diktator dan tirani, karena pemerintahan seperti ini sangat menguntungkan Barat didalam menggenggam sebuah Negara. Tindakan oligarki yang diterapkan maka lengkaplah barat telah mulai memasuki ruang lingkup pemikiran sebuah politik dinegara Indonesia, dimana oligarki ini akan mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan, sehingga bila sebuah pemikiran politik telah dikuasai maka mudahlah untuk menguasai kekuasaan dan kebijakan tersebut.

Tindakan-tindakan seperti itu didalam orde baru juga cocok dengan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, jalan kekerasan yang diambil untuk membungkam lawan politiknya, seperti tragedi-tragedi berdarah, penguasaan pers dan pembungkaman aktivis semua dilakukan demi melanggengkan kekuasaan orde baru. Sehingga hal itu makin menguatkan hipotesis penulis tergadap hegemoni Barat terhadap perpolitikkan orde baru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966-1998)**

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka peneliti akan memfokuskan kepada Historis Politik, dari historis politik disini maka penulis dan kita semua bisa mengetahui bagaimana pengaruh hegemoni di dalam historis perpolitikan orde baru.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari penelitian di atas adapun rumusan permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Hegemoni Barat dalam Historis Politik di Indonesia Era Orde Baru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengaruh Hegemoni Barat Dalam Historis Politik Indonesia Era Orde Baru?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh pengaruh hegemoni barat di dalam historis politik di Indonesia masa orde baru
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hegemoni barat di dalam historis politik di Indonesia era orde baru

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang hendak diraih adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah:
 - 1.) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi civitas akademisi dan politisi Muslim untuk mengulas lebih dalam pengaruh hegemoni barat di dalam historis politik di Indonesia.
 - 2.) Penelitian ini diharapkan mampu memahami masyarakat awam tentang buruknya pengaruh hegemoni barat
- b. Kegunaan Praktis:
 - 1.) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan landasan dalam politisi Muslim yang duduk di kursi Pemerintahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bisa mengetahui dan membendung pengaruh hegemoni barat melalui kekuasaanya.

- 2.) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh nilai Islam dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

E. METODE PENELITIAN

Sebelum penulsi masuk ke dalam pembahasan dan sistematikanya, maka harus memahami dahulu, pengertian metode dan pengertian penelitian, jadi dari kedua pengetahuan tersebut bisa kita pahami arti dari metode penelitian, barulah dari situ kita bisa mengupas dan mengulas sistematikanya secara bertahap.

Metode Ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian²¹ sedangkan penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.

²¹ <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/metode-ilmiah-pengertian-syarat-dan-tahapan-tahapannya-1918/> (Diakses pada tanggal 26 September 2020, pukul 20:30 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.²²

Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis untuk mencari jawaban dari masalah masalah untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Sehingga didapat sebuah jawaban yang memuaskan dari hasil metode yang rapi dan tersistematik tersebut

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang yang telah dijelaskan penulis bahwasanya penelitian ini adalah penelitian pustaka, dimana penulis mencari data dari buku-buku, artikel dan laporan-laporan serta catatan dan dokumen yang mengandung materi dari penelitian penulis.

Pemilihan penelitian pustaka ini adalah sebagai penelitian pendahuluan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lengkap, lebih rinci dan spesifik didalam permasalahan ini

²² Sandu Suyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hal. 8-9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan secara jelas tentang permasalahan pokok penelitian²³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggabungkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pengaruh hegemoni barat dan tinjauan terhadap fiqh siyasah.

4. Sumber Data

Karena penulis tidak mengambil data dari tangan pertama yaitu primer sehingga sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, surat kabar, dan lain lain.²⁴

Sumber data sekunder tersebut penulis jadikan sebagai sumber data primer untuk menganalisis dan menarasikan hasil-hasil

²³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000) hal. 58

²⁴ <https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html> (Diakses pada tanggal 26 September 2020, pukul 21:00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penulis dapatkan dari sumber seperti buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan sesuai dengan jenis penelitian yang diambil adalah studi kepustakaan, dimana penulis mencari jawaban dari pokok permasalahan, ruang lingkup permasalahan yang sebelumnya telah penulis analisis sebelumnya. Data-data nya dari buku-buku, artikel dan bahkan dokumen yang terkait dari penelitian yang penulis lakukan.

Adapaun studi kepustakaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: ²⁵ *Pertama*, Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya, dan *Kedua*, Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.

Jadi teknik yang penulis gunakan adalah dengan cara menelaah informasi dari buku dan jurnal yang terkait sehingga bisa membuat sebuah narasi untuk memecahkan permasalahan dari judul tersebut.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, hal. 112-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Penyusun Proposal penelitian menelaah dengan sumber dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sifatnya umum dan sedapat mungkin menyeluruh (*insight*) karena baru akan memilih problema yang akan digarap. Penyusun laporan penelitian di dalam menelaah bahan pustaka sudah digiring perhatiannya oleh permasalahan yang sedang ia tekuni, yaitu terpecahnya problematika penelitian yang sudah dirumuskan serta sudah dicarikan data.²⁶

Dari uraian diatas, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, dari analisa model ini diharapkan materi yang disajikan lebih menarik dan mendapati titik temu dari permasalahan yang dipertanyakan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan nantinya, penulis memilah karya ilmiah ini kedalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis bagi kedalam 5 (lima) bentuk yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan

²⁶ Hardani. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2009), hal. 101-101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : SEJARAH ORDE BARU

(Di dalam bab 2 ini dibahas mengenai pengertian orde baru, sistem pemerintahan orde baru serta dan tujuan serta ciri-ciri orde baru

BAB III : KAJIAN TEORITIS: HEGEMONI BARAT, OLIGARKI DAN SIYASAH DAULIYAH

(Didalam bab ini penulis menjabarkan tentang hegemoni barat, oligarki dan siyasah dauliyah meliputi membahas mengenai sejarah siyasah dauliyah,)

BAB IV : PEMBAHASAN

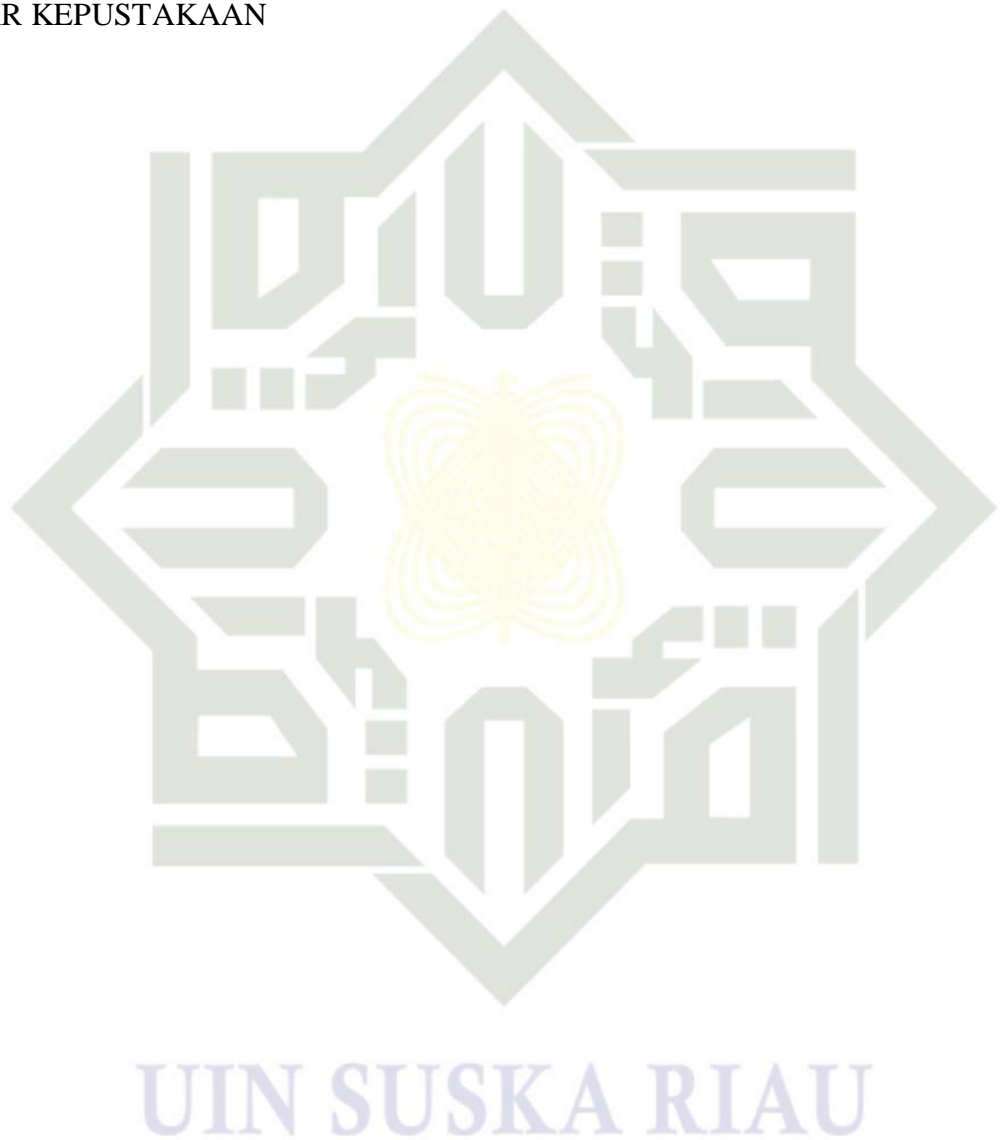
(Didalam bab ini, penulis menjabarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah sebelumnya, sehingga bisa mendapati hasil yang rapi dan tersistematik. Seperti menjelaskan tentang pengaruh hegemoni barat dalam historis perpolitikan di Indonesia era orde baru dan menjelaskan tentang tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengaruh hegemoni barat dalam historis politik Indonesia era orde baru tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN (Didalam bab ini dijabarkan kesimpulan dari keseluruhan dan saran sarannya).

DAFTAR KEPUSTAKAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS: SEJARAH ORDE BARU

A. PENGERTIAN ORDE BARU

Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.²⁷

Adanya tuntutan agar PKI dibubarkan dalam aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), dijadikan bukti kuat bahwa masyarakat tidak menginginkan partai yang ingin mengubah ideologi pancasila yaitu Pancasila. Oleh karena itu Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu yaitu Soeharto menerima Suoersemar, PKI dan *onderbouw*-nya dibubarkan. Selanjutnya pada 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembentukan Front Pancasila sebagai wadah persatuan dan kesatuan rakyat pendukung Pancasila dan UUD 1945.²⁸

Latar Belakang Lahirnya Tritura sebagai berikut:²⁹

Bidang Politik, Seperti diketahui bersama bahwasanya PKI sejak dulu sudah berkeinginan mendirikan Negara komunis di Indonesia.

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru (Diakses pada tanggal 20 April 2021, Pukul. 22:04)

²⁸ Arin Kusumaningrum, *Awal Orde Baru*, (Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tagas, 2019), hal: 5

²⁹ Hedra Permana, *Orde Baru*, (Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018), hal:5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keinginan itu mendapat rintangan dari para perwira ABRI mereka hanya ingin satu saja ideologi yang berlaku yaitu Pancasila. Apabila PKI berkausa maka Pancasila akan dihapus dan digantikan oleh Komunis terlebih lagi ideologi komunis sangat bertentangan dengan Pancasila.

Bidang Ekonomi, menjelang lahirnya Tritura, ekonomi Indonesia sangat parah. Di mana-mana terjadi kelaparan. Tidak ada lapisan masyarakat yang hidup berkecukupan. Kebutuhan bahan pokok dikuasai oleh pemerintah dan termasuk juga PKI masa itu yang masih didalam pemerintahan. Oleh karena itu, kepada masyarakat hanya diberikan jatah beras, sandang atau pangan.

Bidang Pemerintahan, dalam lembaga pemerintahan sebagian masih ada orang-orang yang berpaham komunis. Jenderal Soeharto sangat berhati-hati akan hal ini, dia memerlukan waktu untuk mencermati mana lawan dan kawan masa itu terlebih lagi keadaan buruk saat Ir. Soekarno menolak mengeluarkan orang-orang komunis yang duduk di pemerintahan.

Orde baru memasuki fase awal maka dilakukanlah usaha penataan kembali kehidupan politik dimulai pada tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyerdehanaan kehidupan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepartaian, keormasan, dan kekaryaan dengan cara pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya.³⁰

B. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini Indonesia sudah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan, salah satunya adalah era Orde Baru (Orba) yang berlangsung sejak tahun 1966 - 1998. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan yang terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno. President sesudah Soekarno pada masa Orde Baru adalah Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Supersemar setelah peristiwa peristiwa G30S PKI di tahun 1965.³¹

Era Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dari pandangan masa orde baru yang diubah karena sebagai penyimpangan di masa orde lama. Misalnya jabatan Presiden menjadi identitas hidup, dan belum adanya MPR, DPR dan DPA yang sah.

³⁰ *Ibid*, hal: 8

³¹ <https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sistem-pemerintahan-pada-masa-orde-baru/> (Diakses pada tanggal 12 April 2021, Pukul. 20:18)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta UUD 1945 untuk setiap kebijakan pemerintah.³²

Dalam sistem pemerintahan pada masa Orde Baru juga dilakukan perampangan partai - partai politik sehingga hanya menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaannya, Golkar menjadi the single of the single who are always winnership of the days Orde Baru. Ketidak puasan apapun yang muncul pada masa itu dengan cepat langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang tampak pada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yaitu bahwa Lembaga Kepresidenan memegang kekuasaan yang sangat besar.³³

C. TUJUAN DAN CIRI-CIRI ORDE BARU

Akibat peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia.³⁴

Secara lengkap, berikut **tujuan umum pemerintahan orde baru**.³⁵

1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan orde lama.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ <https://www.bospedia.com/2018/05/orde-baru.html?m=1> (Diakses pada tanggal 12 April 2021, Pukul. 08:25)

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
3. Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa

Ciri-Ciri Orde Baru adalah:³⁶

1. Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali.
2. Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pada HAM.
3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
4. Pemilu hanya mengikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis.
5. Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, dimana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden.
6. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi dimana-mana.
8. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup.

³⁶ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PERADABAN BARAT, OLIGARKI DAN, SIYASAH DAULIYAH

A. HEGEMONI BARAT

Selama ini banyak cendekiawan Islam terpesona oleh peradaban Barat. Kemajuan serta kemegahan yang telah dicapai oleh Barat menyilaukan mata sebagian dari kita. Maka ada juga yang berfikir, jika umat Islam mau maju maka harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Barat. Pandangan yang demikian pada akhirnya memunculkan sikap interior di hadapan Barat. Peradaban sesungguhnya bahwa asing itu diperlakukan dengan penuh hormat dan takhzim, dipuja serta dipuji. Sementara, ketika mereka melihat peradaban Islam, mereka menatap dengan penuh rasa malu dikarenakan kemunduran. Kemiskinan, dan keterpurukkannya sendiri. Kondisi ini membuat Barat kemudian dimitoskan sebagai pencerah dan membawa berita gembira. Akan tetapi tidak semua orang Islam atau cendekiawan tersebut yang tertalu memuji peradaban Barat dan menyepelekan peradaban Islam.³⁷

Sesudah penulis kasih gambaran tersebut, maka mari penulis kupas mengenai Peradaban Barat ini hingga bisa melakukan hegemoni disana-sini. Baik mengenai pemahasan pertama kita bahas bagaimana wajah peradaban barat sebenarnya dan mengenai hegemoni yang mereka lakukan serta jalan akhir menuju kematian sebuah peradaban.

³⁷ <https://nuun.id/melihat-barat-dengan-kaca-pembesar> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 21:23)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum menjelajah lebih jauh, maka penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan Barat tersebut. Istilah barat adalah isyilah yang merujuk kepada sebuah peradaban (*western civilization*) oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Prancis dan Jerman serta lainnya. Terutama dalam hal pemikiran, perkembangan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan seni. Peradaban ini berdasar pada pemikiran Yunani Kuno (Filsafat), Romawi (Undang-Undang Kenegaraan) dan tradisi budaya keagamaan Kristen-Yahudi Barat yang berkembang setelah zaman modern.³⁸

Sekularisasi merupakan fenomena khas dalam dunia Kristen. Menurut Bernard Lewis, pemikir politik paling berpengaruh di Amerika Serikat sesudah berakhirnya Perang Dingin, "*Sejak awal mula, kaum Kristen diajarkan baik dalam persepsi maupun praktis untuk memisahkan antara Tuhan dan Kaisar dan dipahamkan tentang adanya kewaiiban yang berbeda antara keduanya.*" Dalam bukunya, *Christinnity in World History*, Arend Theodor van Leeuwen, mencatat, penyebaran Kristen di Eropa membawa pesan sekularisasi. Kata Leeuwen, "Kristenisasi dan sekularisasi terlibat bersama dalam suahr hubungan yang dialektikal." Maka, menurutnya, persentuhan antara kultur sekular Barat dengan kultur tradisional religius di Timur: Tengah dan Asia, adalah bermulanya babak baru dalam sejarah

³⁸ <https://saripedia.wordpress.com/tag/peradaban-barat/> (Diakses pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul 15.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretrlarisasi. Sebab, kultur sekular adalah hadiah Kristen kepada dunia (*Christianity's gift to the world*).³⁹

Pandangan Lewis dan Leeuwen merupakan babak baru dalam sejarah peradaban Barat, di mana kekristenan telah mengalami tekanan berat, sehingga dipaksa untuk memperkecil atau membatasi wilayah otoritasnya. Gereja dipaksa menjadi sekular, dengan melepaskan wilayah otoritasnya dalam dunia politik. Fenomena sekularisasi dan liberalisasi pada peradaban Barat yang kemudian diglobalkan ke seluruh dunia sebenarnya dapat ditelusuri dari proses sejarah yang panjang yang dialami oleh salah satu peradaban besar di dunia ini. Dalam buku *The Secularization of the Europenn Mind in the Nineteenth Century* Owen Chadwick menulis satu bab berjudul "On Liberalism" Kata liberal secara harfiah artinya "bebas" (free), artinya "bebas dari berbagai batasan" (*free from restraint*). Negara liberal," tulis Chadwick, "haruslah negara sekular".⁴⁰

Mengapa Barat kemudian memilih jalan hidup sekular-liberal? setidaknya, ada tiga faktor penting yang menjadi latar belakang, mengapa Barat memilih jalan hidup sekuler dan liberal dan kemudian mengglobalkan pandangan hidup dan nilai-nilainya ke seluruh dunia, termasuk di dunia Islam. *Pertama*, trauma sejarah, khususnya yang berhtrbungan dengan dominasi agama (Kristen) di zaman pertengahan.

³⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, hal: 28

⁴⁰ *Ibid*, hal: 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, problema teks Bible. Dan *Ketiga*, problema teologis Kristen. Ketiga problema itu terkait satu dengan lainnya, sehingga memunculkan sikap traumatis terhadap agama, yang pada ujungnya melahirkan sikap berpikir sekular-liberal dalam sejarah tradisi pemikiran Barat modem.⁴¹

Dalam perjalanan sejarahnya, peradaban Barat (*western Civilization*) telah mengalami masa yang pahit, yang mereka sebut zaman kegelapan" (*the dark ages*). Mereka menyebutnya juga sebagai "Zaman Pertengahan" (*the medievel ages*). Zarnan itu dimulai ketika Imperium Romawi Barat runtuh pada 476 dan mulai munculnya Gereja Kristen sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat sampai dengan masuknya *zaman renneissance* sekitar abad ke- 14. Karena itu, mereka menyebut zaman baru dengan istilah "*renaissance*" yang artinya "*rebirth*" (lahir kembali). Mereka seperti merasa, bahwa ketika hidup di bawah cengkeraman kekuasaan Gereja, mereka mengalami kematian. sebab, ketika itu Gereja yang mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka bumi melakukan hegemoni terhadap kehidupan masyarakat dan melakukan berbagai tindakan brutal yang sangat tidak manusiawi. Sejarah dominasi kekuasaan Gereja bisa ditelusuri sejak awal mula tumbuhnya Kristen sebagai agama negara di zaman Romawi. Besarnya kekuasaan yang dimiliki Gereja melahirkan berbagai penyimpangan. Tahun 1887, Lord Acton

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti menyindir hegemoni kekuasaan Gereja dan menulis surat kepada Uskup Mandell Creighton. Isinya antara lain: "Semua kekuasaan cenderung komp; dan kekuasaan yang mutlak melakukan korupsi secara mutlak"⁴²

Untuk memahami latar belakang penindasan brutal terhadap kaum non-Kristen dan kelompok-kelompok yang dianggap kafir lainnya, yang lantas melahirkan trauma terhadap agama/ sangat penting bagi kita untuk menelaah sejarah mengapa dan bagaimana Gereja di zaman Pertengahan membangun kekuatan hegemoniknya. Salah satu fenomena penting dalam sejarah Abad Pertengahan di Eropa adalah upaya Gereja Kristen memperoleh dan memelihara kekuatan politiknya. Agama Kristen mulai mendapatkan peluang kebebasan setelah beratus tahun mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi dari Kaisar Konstantin, yang pada tahun 313 M mengeluarkan Edict of Milan. Dengan dikeluarkannya Edict of Theodosius pada tahun 392 M, agama Kristen memegang posisi sebagai agama negara (*state-religion*) dari Imperium Romawi (*Roman Empire*).⁴³

Untuk memahami apa yang terjadi pada saat tersebut, maka dikenali pada tahun 1478 mulai terbentuk di Spanyol dan berakhir pada tahun 1820 dengan nama **Inquisisi**. Pembentukan ini awalnya dipicu dengan laporan bahwa para Yahudi dan Muslim yang dipaksa memeluk Kristen masih tetap mempraktikkan ritualitas agama lama

⁴² *Ibid*, hal:30

⁴³ *Ibid*, hal: 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Pada tahun 1480, dimulai satu penyelidikan dan pengadilan terhadap mereka disebuah jalan utama di Kota Barcelona, yang dikenal sebagai Ramblas, disini semua korban disiksa. Kekejaman Inquisisi telah memunculkan berbagai kecaman dan kritikan hebat dari kalangan Kristen sendiri. Sebab, yang menjadi korban kemudian bukan hanya kaum Kristen yang dianggap sebagai menyimpang dari doktrin resmi gereja, tetapi juga berbagai kelompok lainnya yang dianggap mengancam doktrin dan hegemoni gereja seperti kaum Muslim, Yahudi, wanita tukang sihir dan sebagainya.⁴⁴

Sikap dan tindakan Inquisisi Gereja untuk membentuk inquisisi dalam pembasmian berbagai hal yang dianggap mengancam Kristen dan gereja dengan alasan pemurnian agama, pada dasarnya juga merupakan satu bentuk penjagaan hegemoni gereja. Sebab, gereja ketika itu, disamping merupakan institusi keagamaan juga mengakumulasi berbagai jenis kekuatan. Hegemoni secara tradisional, diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh suatu Negara terhadap sejumlah Negara lainnya. Dalam teori budaya Marxis kontemporer yang dikembangkan oleh Gramsci, hegemoni merujuk pada monopoli budaya yang diduga dilakukan oleh kelas dominan. Sebagaimana disebutkan, kekuatan terpenting di Zaman Pertengahan adalah gereja. Sebagai sentral kekuatan, Gereja membutuhkan

⁴⁴ Adian Husaini, *Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat*, (Volume 2, 2013), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjagaan atas hegemoninya untuk memelihara kepentingan-kepentingannya, maka, segala sesuatu yang dipersepsikan sebagai ancaman, haruslah dihancurkan. Inquisisi juga dibentuk dalam kerangka memasmi musuh-musuh Gereja. Apa yang dilakukan Gereja abad pertengahan dalam menghimpun dan mengkonsentrasikan kekuasaan dapatlah dikatakan sebagai suatu bentuk pemeliharaan hegemoni.⁴⁵

Buku Huntington yang terakhir yaitu *Where Are We? The Challenges to America's National Identity*, memberikan gambaran yang lebih tegas tentang pemikirannya tentang Islam dan Barat. Jika di dalam *The Clash of Civilizations* ia masih tidak terlalu tegas menyebut Islam sebagai alternatif musuh baru bagi Barat, maka dalam bukunya kali ini, ia menggunakan bahasa yang lebih lugas, bahwa musuh utama Barat pasca Perang Dingin adalah Islam dengan menambahkan predikat militant. Namun kata Islam militant ini menjadi kabur karena seakan-akan menggiring opini untuk mengambil sikap praktis terhadap umat Islam seluruhnya.⁴⁶

Di dalam buku ini, Huntington menyebut, Islam militant bukan hanya Osama bin Laden atau kelompok Al-Qaeda saja. Tetapi, banyak kelompok lain yang bersifat negatif terhadap AS. Dia bahkan membandingkan dengan cara kerja komunis internasional dulu, kelompok kelompok Islam militant ikut melakukan protes dan

⁴⁵ *Ibid*, hal: 203-204

⁴⁶ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, *Op cit*, hal: 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demonstrasi damai, dan partai-partai Islam ikut bertanding dalam pemilihan umum serta mereka juga melakukan kerja-kerja amal sosial.⁴⁷

Dengan definisi dan gambaran diatas banyak kelompok Islam yang dimasukkan ke dalam kategori militan dan layak diserang secara dini. Tanpa menampilkan sebab-sebab dan fakta yang komprehensif. Ia hanya menjerlaskan kasus-kasus Muslim menyerang kaum Protestan, Katolik, Kristen Ortodoks, Hindu, Yahudi, Buddha atau Cina. Namun dia tidak menjeaskan apakah kasus-kasus itu karena Muslim diperangi an dizhalimi atau Muslim yang memerangi. Penjelasan dibuku tersebut terkesan tidak adil dan bahkan dia tidak menyorot kasus Bosnia dimana dalam kasus tersebut Muslim menjadi korban kebiadaban Kristen Serbia. Tidak pula ia melihat posisi AS dan sekutung saat itu yang hanya sebagai penonton yang budiman.⁴⁸

Selain menjelaskan sejarah secara tidak adil dan melakuka doktrinasasi atas pemikiran-pemikiran provikatifnya terhadap Islam, Huntington juga tidak mengakui bahwa kebijakan AS yang membabi buta mendukung kekejaman dan penjajahan Israel adal keliru dan menjadi sebab atas kemarahan umat Islam dan umat manusia. Ia hanya mau menunjukkan bahwa Islam adalah potensi musuh besar kaum manusia dengan mengandalkan polling-polling yang ditujukannya kepada negeri Islam yang tidak menyukai kebijakan AS. Lagi dan lagi

⁴⁷ *Ibid*, hal: 143

⁴⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah emaparan yang tidak adil dipaparkannya, ia tidak mau menunjukkan fakta bahwa kebencian masyarakat Eropa dan rakyat AS sendiri terhadap kebijakan AS. Dan bahkan para Ilmuwan dari kalangan AS tanpa ragu-ragu seperti Chomsky, Wiliam Blum, memberikan julukan AS sebagai “Negara teroris terkemuka” atau *a rogue state*. Dan sebuah statetment menarik yaitu “Retorika perang idelogi Amerika terhadap komunisme militant telah beralihcmenjadi perang Agama dan kebudayaan terhadap Islam militan”.⁴⁹

Kebijakan AS tersebut kuat adanya pengaruh dari lobi-lobi Yahudi. Bahkan Michael Kinsley yang seorang Yahudi Liberal mengibararkan hal ini sebagai “gajah dalam ruangan” karena besarnya pengarus Israel dalam kebijakan penyerangab AS ke Iraq. Noam Chomsky pun telah berulang kali mengingatkan akan bahanya dominasi lobi Yahudi terhadap masa depan AS.⁵⁰

Kini sosok “gajah dalam ruangan” itu diperjelas lagi oleh Michel Collin Piper didalam bukunya *The High Priest of war*. Piper menulis, perang terhadap Iraq secara sistematis dirancang sekelompok kecil orang kuat dan memiliki jaringan dengan elemen-elemen Zionis sayap kanan. Buku ini menarik karena tulisan faktualnya yang ringkas dan lugas serta ia mengatakan kelompok kecil tersebut telah berhasil masuk dan menjadikan pemerintahan Bush sebagai kendaraa untuk

⁴⁹ *Ibid*, hal: 144

⁵⁰ *Ibid*, hal: 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan satu kebijakan yang berbasis pada *unilateralism*, *permanent*, *mobilisation*, dan *preventive war*.⁵¹

Bernard Lewis membuat sebuah pembagian untuk memudahkan Barat dalam membuat kebijakan politik, Ia membagi Muslim kedalam tiga kelompok: *Pertama*, yang melihat Barat secara umum dan AS secara khusus sebagai musuh Islam yang abadi, penghalang utama keimanan dan hukum Tuhan. Maka, cara satu-satunya dalam menghadapi Barat adalah perang. *Kedua*, kalangan muslim yang tetap berpegang kepada kepercayaan dan budayanya, tetapi mau bergabung dengan Barat untuk menciptakan dunia yang lebih baik. *Ketiga*, Muslim yang melihat Barat sebagai musuh utama, tetapi karena sadar terhadap kekuatan Barat, maka mereka melakukan akomodasi sesaat, untuk mempersiapkan perjuangan akhir. Di akhir Lewis mengingatkan Barat untuk mewaspadaai dan tidak salah mengidentifikasi terhadap kelompok kedua dan ketiga.⁵²

Dengan tegas, sebagaimana Huntington, Lewis menyebut Muslim fundamentalis sebagai musuh Barat. Ia bahkan menyebut dan merincikan yang dianggap sebagai Muslim fundamentalis. *Pertama*, menganggap masalah yang dihadapi Muslim sebagai dampak modernisasi yang berlebihan dan mengkhianati nilai-nilai Islam yang murni. *Kedua*, menganggap obat dari penyakit itu adalah kembali kepada Islam sejati dan sekaligus menghapuskan semua hukum dan

⁵¹ *Ibid*, hal: 146

⁵² *Ibid*, hal: 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek-aspek sosial yang dipinjam dari Barat serta menggantikannya dengan syariat. *Ketiga*, dan menganggap bahwa perjuangan tertinggi adalah melawan pengkhianat di dunia Islam yang melakukan westernisasi. Konsep ini disusun oleh Lewis dengan mengutip sebagian ungkapan Abd al-Salam Faraj, penulis Mesir

Dari pandangan dari kedua tokoh diatas yang meupakan tokoh yang pemikirannya sangat mempengaruhi kebijakan AS dan Barat dalam memandang Islam sehingga pandangan Barat terhadap Islam seperti nada mewaspada karena menganggap Islam sebagai ancaman. Dengan menyebut Islam militant dan Islam Fundamentalis itu secara tidak langsung menyasar keseluruhan umat Islam walaupun Lewis telah membagi dan merinci namun arah dan tujuannya tetap kepada Islam sebagai ancaman secara tidak langsung selepas berakhirnya perang dingin.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan buah hasil pemikiran mereka berdua yang melahirkan dan mengarah perselingkuhan dengan Zionis untuk meredam Islam. Terlihat fakta yang telah dipaparkan seperti hasil resolusi 181 dan pernyataan Presiden Truman sehingga Barat lebih dekat kepada Zionis. Mereka dengan sekuat tenaga membela kebijakan AS karena itu demi menutupi kedekatannya dengan Zionis dan menutupi keganasan AS dan Barat terhadap Islam terlebih lagi ada campur tangan dengan Zionis Yahudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai hegemoni barat sejatinya tidak lepas dari peristiwa perang dingin dimana kedua negara barat yaitu Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika Serikat dengan demokrasi dan kapitalismenya serta sekuler liberalnya. Namun perang dingin ini tidak menggunakan kekuatan militer akan tetapi menggunakan persaingan politik, ekonomi dan propagandanya.

Protes-protes berbagai kalangan terhadap ketidakadilan kuasa besar atau penguasa dunia itu sejatinya menunjukkan, bagaimana watak peradaban Barat yang dimainkan oleh AS, yang begitu mementingkan dirinya sendiri, meskipun harus menghancurkan bumi, alam semesta dan umat manusia. Padahal, lingkungan hidup termasuk salah satu isu utama dalam politik luar negeri AS, di samping demokratisasi dan Hak Asasi Manusia. Setelah peristiwa 11 September 2001, isu terorisme internasional mengalahkan isu-isu tersebut. Padahal, kerusakan demi kerusakan dalam sektor lingkungan hidup terus berlangsung. Penduduk AS, yang hanya 6 persen penduduk bumi, mengkonsumsi 40 persen sumber-sumber energi dunia. Bahkan, warga negara-negara Barat, yang hanya sekitar 20 persen dari total penduduk bumi, kini mengkonsumsi 80 persen minyak dunia. Ironisnya, 65 persen sumber minyak itu kini ada di negara-negara Teluk. Di Barat sendiri, sumber minyak hanya akan bertahan 20 tahun lagi. Sementara di negara-negara Teluk (Muslim) sumber itu masih bertahan sekitar 100 tahun lagi, dengan jumlah eksploitasi seperti sekarang ini. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi seperti itu, bisa dipahami, jika AS begitu serius dalam memburu sumber-sumber minyak, terutama di Timur Tengah dan Asia Tengah, karena AS memang negara yang sangat haus minyak.⁵³

Sebelum melakukan hegemoni pastinya mereka menghancurkan dahulu apa yang dianggap oleh mereka sebagai penghalang, contoh peristiwa karena campur tangan mereka adalah saat meruntuhkan Kekhilafah Turki Utsmani, dimana runtuhnya ini penuh propaganda dan konspirasi Barat dan Zionis yang bersatu dibawa organisasi freemasonry. Dimana agen-agen ini menyusup kedalam tubuh Turki Ustamani maka muncullah Gerakan Turki Muda dan Komite & dan Kemajuan.

Setelah melancarkan serangan pertama, maka serangan kedua adalah sebuah propaganda, propaganda ini bertujuan merusak citra Sultan Abdul Hamid II. Rupanya cara ini cukup menyita perhatian publik dan pemerintahan memerintahkan dari mana sumber pemberitaan tersebut namun hasilnya nihil karena rapinya para pelaku menyembunyikan identitasnya.⁵⁴

Sampai ditahap ini sebenarnya serangan yang dilancarkan Gerakan Turki Muda, Komite Persatuan Kemajuan dan semua kelompok oposisi telah berhasil mengembalikan konstitusi 1876. Namun, belum berhasil menggulingkan Sultan, karena adanya

⁵³ Adian Husaini, *op cit*, *Wajah Peradaban Barat*, hal: 117

⁵⁴ Deden A. Herdiasnyah, *Di Balik Runtuhnya Turki Utsmani*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), hal: 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi opini public oleh Sultan sehingga banyak rakyat yang memandang Sultan sebagai pahlawan ujar Erik J. Zurcher. Dengan kata lain Sultan berhasil meredam dan mengendalikan situasi yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya.⁵⁵ Nada berbeda disampaikan oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi mengatakan kegagalan tersebut ada tiga alasan yaitu: Pertama, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908. *Kedua*, Sultan Abdul Hamid II bergerak elastis dan fleksibel dengan menuruti tuntutan untuk mengembalikan konstitusi 1876 sehingga tidak ada lagi alasan untuk menurunkannya. Dan yang *Ketiga*, Besarnya loyalitas masyarakat Turki Ustmani kepada Sultan Abdul Hamid II.⁵⁶

Dini hari tanggal 24 April 1909, Tentara Aksi dapat menguasai Istanbul tanpa perlawanan yang berarti. Dan pada hari Selasa, 27 April 1909 atas desakan kaum revolusioner terhadap mufti Islam Muhammad Dhiyauddin, sebanyak 240 anggota Majelis A'yan (tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk) mengadakan pertemuan untuk mencopot Sultan Abdul Hamid II, Fatwa dibacakan dan keputusannya adalah mencopot Sultan dari jabatannya.⁵⁷

Setelah itu, dibentuklah panitia untuk bertugas menyampaikannya secara langsung kepada Sultan atas desakan dari Komite Persatuan dan Kemajuan. Kepanitian terdiri atas 4 orang itu:

⁵⁵ *Ibid*, hal: 120

⁵⁶ *Ibid*, hal: 122

⁵⁷ *Ibid*, hal: 126-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emmanuel Carasso (seorang Yahudi asal Spanyol dan anggota Gerakan Turki Muda), *Aram* (Dia adalah anggota Majelis Perwakilan yang berasal dari Armenia), *As'ad Thubathani* (Dia adalah orang Albania yang merupakan wakil dari kawasan Darraj), *Arif Hikmat* (Dia adalah seorang perwira angkatan laut yang menjadi anggota Majelis A'yan dan berasal dari Iraq Karajabani. Dari keempat utusa tersebut yang mengherankan adalah tidak adanya yang berasal dari Turki atau Arab.⁵⁸

Alasan yang mereka gunakan dalam mencopot Sultan Abdul Hamid II yaitu: *Pertama*, Sultan dituduh sebagai aktor yang merencanakan peristiwa 31 Maret. *Kedua*, Membakar Al-Qur'an. *Ketiga*, Melakukan pemborosan. *Keempat*, Orang yang zalim dan penumpah darah. Tuduhan-tuduhan serius itu tentu saja perlu memiliki bukti yang kuat dan memadai. Karena bila diyeliti dari jawaban Sultan dan literatur lainnya jelas tuduhan tersebut mudah dipatahkan. Bagaimanapun propaganda mereka telah terbukti dan berhasil. Dominasi mereka pasca Sultan Abdul Hamid II dipemerintahan segera dimulai.⁵⁹

Setelah penggulingan Sultan Hamid II, maka kedudukan ketiga Sultan berikutnya yaitu: Sultan Muhammad V, Sultan Muhammad VI dan Sultan Abdul Majid II hanya sebagai simbol semata dan pada tahun 1924 resmi kekhalifahan Turki Utsmani dihapuskan.

⁵⁸ *Ibid*, hal: 127-128

⁵⁹ *Ibid*, hal: 128, 129 dan 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Runtuhnya Turki Utsmani juga berarti bahwa Mustafa Kemal melaksanakan semua rancangan tertulis yang ditandatangani olehnya dengan Negara-negara Barat. Rancangan tersebut ada didalam sebuah perjanjian Luzan yang terjadi pada tahun 1923. Dimana isinya sebagai berikut: *Pertama*, keputusan semua hal yang berhubungan dengan Islam dari Turki, *Kedua*, penghapusan kekhalifahan Islam untuk selama-lamanya. *Ketiga*, mengeluarkan khalifah, para pendukung khalifah, dan Islam dari negeri Turki serta mengambil harta khalifah. *Keempat*, mengambil undang-undang sipil sebagai pengganti dari undang-undang Turki yang lama.⁶⁰

Setelah runtuhnya Utsmani, maka saatnya Barat melakukan hegemoninya yang pertama adalah melakukan sekulerisme, liberalisme ke tubuh Negara Turki modern sehingga Turki menganut sistem hidup barat saat itu dan meninggalkan Syariat Islam didalam penerapannya sehari-hari.

Cara kerja barat sebelum menancapkan hegemoninya adalah dengan melakukan invasi pemikiran, dari narasi diatas telah nampak pertama mereka membuat propaganda itu bertujuan untuk merusak tatanan pemikiran masyarakat pada masa itu dan rela menganut sekularisme didalam kehidupan mereka.

Setelah sekularisme masuk, maka liberalisme dan pluralisme masuk bagaikan air yang mengalir lancar tanpa hambatan dikarenakan

⁶⁰ *Ibid*, hal: 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran masyarakat telah diracuni secara massif melalui mimbar bebas, media cetak dan bentuk-bentuk propaganda lainnya. Setelah masuknya racun tersebut maka mereka mulai melakukan sistem pemikiran politik yaitu sebuah sistem oligarki dimana sistem ini sangat menguntungkan mereka dan akan memudahkan perekonomian mereka kuasai dengan kapitalismenya.

Untuk membahas apa itu oligarki, maka penulis akan menjabarkannya di pembahasam berikutnya.

B. Oligarki

Dimana telah penulis singgung sedikit mengenai oligarki di Bab 1, maka sekarang kita bahas oligarki secara khusus dan lengkap serta tentunya tetap mengedepankan hal-hal apa saja yang menjadi objek kajian didalam oligarki ini.

Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “oligarchia”, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkhein yang memiliki arti memerintah. Awal mula sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi pada negara Yunani Kuno. Di dalam beberapa teori, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan sekelompok kecil, sedangkan oligarki (oligarch) diartikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar – besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan ataupun dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial.⁶¹

Jika konsep oligarki berdasarkan pada hal “minoritas yang menguasai mayoritas”, bisa dikatakan jika di setiap kekuasaan hingga pemerintahan yang memposisikan minoritas di dalam kepemimpinan, bisa dikatakan sebagai sistem pemerintahan oligarki. Sistem oligarki terjadi di negara Soviet, kardinal gereja, pada sebuah direksi perusahaan hingga demokrasi itu sendiri sebab di dalamnya hanya dipimpin atau dikuasai oleh sedikit orang. Oleh karena itu, seorang profesor dari Northwestern University, Jeffrey A. Winters mengubah konsep dan pemahaman mengenai oligarki. Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

⁶¹ <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2021, Pukul. 17:33)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kekuasaan yang obligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.⁶²

Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak. Dari ciri – ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu: *Pertama*, Oligarki Panglima, Oligarki ini muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan ekerasam secara langsung. Oligarki panglima ini mempunyai tentara dan senjata untuk merebut sumber daya secara langsung. *Kedua*, Oligarki Penguasa Kolektif, Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling berkerjasama dalam mempertahankan kekayaannya dan kekuasaannya dengan cara memimpin dan memerintah disuatu komunitas. *Ketiga*, Oligarki Sultanik, Oligarki ini terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligark saja. *Keempat*, Oligarki Sipil, Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang lebih kuat. Sehingga, oligark

⁶² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara menghindari dari jangkauan Negara dalam mendistribusikan kekayaannya.⁶³

C. PENGERTIAN SIYASAH DAULIYAH

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kaum Dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud., dan qishash. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar Negara tersebut.⁶⁴

a. Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah dauliyah dan dijadiam ukuran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak, adalah:

1. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, berbeda agama,

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1>

(Dkses pada tanggal 4 Maret 2021. Pukul, 21:56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun itu semua merupakan satu kesatuan dikarenakan sama-sama makhluk Allah.⁶⁵

2. Keadilan

Di dalam siyasah dauliyah, hidup berdampingan dengan kedamaian akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Maka dari itu, Islam mewajibkan penegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga bahkan terhadap diri sendiri bahkan terhadap musuhpun sekalipun kita wajib bertindak adil.⁶⁶

3. Persamaan

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila di dalam kesederajatan antar Negara dan antar bangsa. Adapun perbedaan-perbedaan di antara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing di dunia ini, bisa disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-insaniyah al-musawah*,

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hal: 187

⁶⁶ *Ibid*, hal: 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti *Hukum asal didalam kemanusiaan adalah sama*.⁶⁷

4. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, seharusnya manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnta dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan terhadap bangsa dan Negara.⁶⁸

5. Tasamuh (Toleransi)

Setiap manusia memiliki rasa pemaaf dan tidak saling bermusuhan satu sama lain dan mengarah kepada saling bertoleransi tanpa adanya dendam dan permusuhan karena sikap ini telah dipraktekkan oleh Nabi antara lain pada waktu membeaskan kota Mekkah; Nabi berkata “*Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, pergilah, kamu semua bebas.*”⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hal: 190-192

⁶⁸ *Ibid*, hal: 192

⁶⁹ *Ibid*, hal: 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kerjasama Kemansiaan

Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerjasama disini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia ini. Sudah pasti kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁷⁰

7. Kebebasan, kemerdekaan/ al-Huriyah

Kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan dari dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini bisa dirinci lebih jauh seperti; *Kebebasan berfikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta benda.*⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hal: 196

⁷¹ *Ibid*, hal: 197-198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Perilaku Moral yang baik (al-Akhlak al-Karimah)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini pun diterapkan kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani.⁷²

b. Pembagian Darul Islam

Dalam pembagian *darul Islam* beberapa ulama memiliki paradigma yang berbeda. Terdapat ulama yang membagi *darul Islam* berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, ada juga yang di lihat dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Selain itu, terdapat juga ulama yang memandang bahwasanya pembagian *darul Islam* dibagi berdasarkan sisi pemegang kekuasaan tersebut. Salah satu tokoh madzab Hanafi yakni Imam Abu Yusuf berpendapat bahwasanya pembagian *darul Islam* berdasarkan hukum yang berlaku di dalamnya, meskipun mayoritasnya warga non muslim. *Al-Harb* mengatakan adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian penduduknya beragama Islam. Pemikiran modern yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb memandang bahwa negara yang menerapkan hukum Islam adalah *darul Islam*, tanpa diberlakukannya persyaratan

⁷² *Ibid*, hal: 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yakni muslim. Perbedaan ini bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mensyaratkan penduduknya harus muslim. Dari sisi keamanan warganya harus melaksanakan syariat Islam. Perbedaan *darul Islam* dan *darul Harbi* ini Imam Abu Hanifah memandang dari segi aman yang dirasakan penduduknya. Jika merasakan aman maka negara tersebut merupakan negara *dar Islam* dan begitu juga sebaliknya jika tidak merasakan keamanan maka dikatakan *darul Harbi*.⁷³

Berdasarkan sisi pemegang kekuasaan negara. Salah satu tokoh madzab Syafi'i mengatakan bahwa suatu Negara dipandang sebagai *darul Islam* apabila dipimpin oleh orang muslim. Menurut Javid Iqbal bahwasanya *darul Islam* merupakan negara yang mana dipimpin oleh pemegang kekuasaan orang muslim. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Karena pada hakikatnya kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah, maka *darul Islam* harus menjunjung tinggi supremasi hukum Islam. Selain itu masyarakat muslim diperintahkan untuk mengikuti hukum Islam sehingga menurut hukum Islam pemimpin pemerintahan juga harus Islam.⁷⁴

⁷³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyashah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal: 244-245

⁷⁴ *Ibid*, hal: 245-246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa modern, ciri-ciri tersebut telah bergeser. Artinya suatu negara *darul Islam* adalah negara yang didominasi penduduknya adalah muslim. Meskipun hakikatnya negara tersebut tidak menjalankan sepenuhnya hukum Islam seperti Mesir dan Indonesia. Selain itu, ciri-ciri hukum Islam pada suatu negara merupakan hal yang *urgent* dalam suatu negara disebut *darul Islam* meskipun tidak sepenuhnya mayoritas beragama Islam. Seperti contoh Iran, Malaysia, dan Pakistan. Kriteria inilah yang dijadikan OKI dalam menetapkan hukum Islam.⁷⁵

Pada tingkat kesuciaannya wilayah bahwa hak-hak non muslim untuk menetap pada suatu wilayah. Maka wilayah *darul Islam* terbagi menjadi 3 yakni tanah suci, hijaz, dan selain keduanya. Yang dimaksud dengan tanah suci yakni tanah Mekkah dan wilayah sekitarnya. Di dua wilayah ini yakni Mekkah dan Madinah orang non muslim dilarang untuk menetap, bahkan untuk di kota Mekkah orang non muslim dilarang di sekitar Masjidil Haram. Non muslim sama sekali tidak boleh ke Mekkah dan memasukinya. Namun menurut pendapatnya Abu Hanifah bahwasanya kafir dzimmi dan mu'ahid boleh untuk memasuki Mekkah selama tidak untuk menetap di sana. Untuk kota Hijaz boleh untuk ke sana dengan

⁷⁵ *Ibid*, hal: 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurun waktu 3 hari. Karena pada waktu itu Umar memberikan izin orang Yahudi untuk memasuki kota tersebut untuk urusan dagang tetapi maksimal tiga hari. Al-Ahkam al-Shulthaniyah menjelaskan bahwasanya jika lebih dari 3 hari maka akan dikenai hukuman.⁷⁶

Wilayah dan negara Islam lainnya boleh melakukan akad dzimmah dengan non muslim. Dengan ketentuan kurun waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Darul Harbi* menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya terbagi menjadi tiga bagian yakni negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur *darul Harbi*, negara yang di dalamnya terpenuhi satu unsur *darul Harbi* dan negara yang dikategorikan *darul Harbi*. Negara yang tidak memenuhi unsur *darul Harbi* artinya di dalamnya adanya masyarakat non muslim sebagai pemberlakuan hukum Islam. Negara yang memenuhi salah satu unsur *darul Harbi* yakni wilayah yang dikuasai non muslim dan hukum yang berlakunya hukum Islam meskipun sedikit. Negara dikategorikan negara *darul Harbi* artinya negara yang mana di dalamnya penduduknya non Islam dan tidak memberlakukan hukum Islam.⁷⁷

Jadi kesimpulannya adalah dimana pembagian darul Islam ini terdapat 3 (tiga) yaitu *berdasarkan hukum yang berlaku di*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, hal: 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara tersebut, ada juga yang di lihat dari *sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam*. Selain itu, terdapat juga ulama yang memandang bahwasanya pembagian *darul Islam* dibagi *berdasarkan sisi pemegang kekuasaan tersebut..* Namn pada masa modern, ciri-ciri tersebut telah bergeser. Artinya suatu negara *darul Islam* adalah negara yang didominasi penduduknya adalah muslim. Meskipun hakikatnya negara tersebut tidak menjalankan sepenuhnya hukum Islam.

c. Hubungan Internasional di Waktu Damai

1. Damai adalah Asas Hubungan Internasional

Masalah yang paling intensif didiskusikan oleh para ulama adala pertanyaan mengenai “Apakah hukum asal hubungan internasional itu: perang atau damai?” Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat menentukan uraian-uraian yang lebih rinci di dalam masalah-masalah siyasa dauliyah. Al-Ustadz Abdul Wahab Khallaf telah menjelaskan tentang diskusi para ulama tentang hal-hal tersebut, yang akhirnya terbagi kedalam kedua kelompok.

78

Dimana kelompok pertama mengatakan bahwa hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang. Mereka mengacu kepada Surah Al-Baqarah 216, An-Nisa

⁷⁸ A. Djazuli, *op cit*, hal: 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

74, Al-Anfal 65, dan At-Taubah 29. Dan juga Hadits Nabi yaitu: *“Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan shalawat, melaksanakan shalat, dan mengeluarkan zakat.”*⁷⁹

Kelompok kedua berpendapat sebaliknya yaitu Hukum asal dalam hubungan internasional adalah damai. Alasannya itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezhaliman, menghilangkan fitnah, dan dalam rangka mempertahankan diri. Serta argumentasi mereka ini sesuai dengan surah Al-Baqarah 190-191, An-Nisa 75 dan Al-Hajj 39.⁸⁰

Sepertinya pendapat kelompok kedua lebih mendekati kepada kebenaran, dan para ulama-ulama terkemuka masa kini memiliki kecenderungan kepada pendapat kedua. Namun bukan berarti ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan kelompok pertama tidak berlaku, ayat-ayat tersebut tetap berlaku dalam suasana peperangan. Jadi peperangan dilakukan sebagai langkah terakhir apabila tidak ada jalan keluar lainnya untuk memecahkan masalah. Dalam siyasah dauliyah berpendapat bahwa peperangan terjadi karena sistem politik yang ada sudah tidak mampu lagi menyerap

⁷⁹ *Ibid*, hal: 205

⁸⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memecahkan masalah ketengangan yang timbul di antara dua Negara atau lebih.⁸¹

Konsekuensi dari asas hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian maka: *Pertama*, perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat, hanya dilakukan seperlunya. *Kedua*, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. *Ketiga*, segera menghentikan perang apabila salah satunya cenderung kepada damai. Dan *Keempat*, memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiasi.⁸²

2. Melakukan Hubungan Diplomatik dengan Negara Lain

Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan Negara mana saja. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menampilkan sosok dan watak Islam yang simpatik dan sejuk sehingga menarik pihak lain untuk menerimanya dengan kesadaran sendiri. Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu Negara pun yang dapat berdiri dengan megolasi diri dari pergaulan internasional. Setiap Negara membutuhkan Negara lain untuk memasarkan produk-produk mereka yang dimiliki. Hal

⁸¹ *Ibid*, hal: 206

⁸² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maka timbullah kerja sama internasional dan hubungan diplomatik mulai terbentuk dengan Negara-negara lain. Yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara tatanan kehidupan dunia yang aman dan damai.⁸³

Sebagai tanda adanya hubungan diplomatik tersebut maka dikirimlah utusan baik itu sebagai duta, atase atau diplomat. Mereka melaksanakan tugas dengan membawa surat-surat kepercayaan dari Negara asal mereka. Korps ini berfungsi sebagai simbolis, wakil negaranya dan politis.

d. Hubungan Internasional di Waktu Perang

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perang

Perang dalam Islam untuk mempertahankan diri dan Perang dalam Rangka Dakwah⁸⁴

2. Aturan Perang dalam Siyasah Dauliyah

• Pengumuman Perang

Tidak diperkenankan memasuki peperangan kecuali setelah pengumuman/ Pernyataan perang di dalam waktu yang memungkinkan sampainya berita tersebut kepada musuh. Walaupun demikian tetap tidak

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2014), hal: 278-280

⁸⁴ A. Djazuli, *op cit*, hal: 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh mengharapkan menemui musuh dan kalau menemui musuh maka hendaklah bersabar.⁸⁵

Dan apabila perang tidak bisa dihindari lagi, maka diberikan tiga pilihan, yaitu: *Pertama*, masuk Islam supaya benar-benar sepenuh hati bersama kaum muslimin. *Kedua*, mengadakan perjanjian supaya kamu sekalian merasa tentram dan dapat mengamankan dakwah. *Ketiga*, pengumuman perang ini dilakukan supaya tidak terjadi serangan tiba-tiba sebelum perang dimulai. Tidak ada maksud untuk memperhamba, menjajah tetapi hanya untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kepercayaan.⁸⁶

Dari uraian di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penyerangan tiba-tiba tanpa pengumuman dan tanpa suruhan memilih terlebih dahulu dilarang dalam Islam. Sekalipun didalam perang untuk mempertahankan diri, oleh arena itu, apabila perang dilakukan tanpa memberikan tiga opsi diatas yang telah dikemukakan maka komandan yang memimpin penyerangan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita selama perang, bahkan apabila suatu Negara menyerang tanpa diawali

⁸⁵ *Ibid*, hal: 226

⁸⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumuman terlebih dahulu maka Negara tersebut harus menanggung ganti rugi atas jiwa-jiwa yang terkorbankan selama peperangan dan kerusakan yang terjadi.⁸⁷

- **Etika dan Aturan Perang di dalam Siyash Dauliyah**

Pertama, Dilarang membunuh anak-anak. *Kedua*, Dilarang juga membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang dan juga dilarang untuk memperkosanya. Apabila memperkosa di waktu perang, maka orang tersebut harus bertanggung jawab secara pidana dengan mendapat sanksi zina dan ditambah dengan sanksi ta'zir. *Ketiga*, Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang-orang tua tersebut tidak ikut perang dan juga anak kecil serta wanita. *Keempat*, Tidak memotong dan merusak pohon-pohon dan lading serta sawah. *Kelima*, Tidak merusak binatang ternak baik itu sapi, domba dan lain sebagainya kecuali untuk dimakan. *Keenam*, Tidak menghancurkan gereja, biara dan rumah ibadah. *Ketujuh*, Dilarang pula mencincang-cincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang pun tidak boleh dicincang. *Kedelapan*, Dilarang membunuh pendeta dan para pekerja yang tidak ikut perang.

⁸⁷ *Ibid*, hal: 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, Bersikap sabar, berani, dan ikhlas di dalam melakukan peperangan, membersihkan niat dari mencari keuntungan duniawi. *Kesepuluh*, Tidak melampaui batas dalam arti batas-batas aturan hukum dan moral didalam peperangan.⁸⁸

3. Persiapan dan Organisasi Ketentaraan

Meskipun di dalam perang itu bersifat defensive, hal itu tidaklah berarti tidak ada persiapan diri dalam menghadapi musuh. Persiapan tersebut selain berupa perlengkapan perang, namun juga diperhatikan adalah sumber daya manusianya yang professional dan tangguh serta terampil.⁸⁹

Adapun tentang organisasi ketentaraan pada masa Nabi dan para Khalifah antara lain sebagai berikut: Apabila peperangan itu *Ghazwah* (dipimpin Nabi) maka yang jadi panglima perangnya langsung adalah Rasulullah SAW. Sedangkan apabila peperang tersebut *Sariyah* (tidak disertai Nabi) maka Nabi menunjuk komandan di medan perang.⁹⁰

Sesudah wafatnya Rasulullah SAW maka para Khalifah adalah panglima tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan para panglima perang di setiap medan pertempuran, sering pula para panglima itu disertai oleh wakil

⁸⁸ *Ibid*, hal: 231-233

⁸⁹ *Ibid*, hal: 236-237

⁹⁰ *Ibid*, hal: 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panglima perang yang pada waktu itu bendera dipegang oleh panglima perangnya sebagai symbol kekuasaan komando ada pada tangannya.⁹¹

4. Penghentian Perang

Upaya-upaya untuk penghentian peperangan antara lain:

Pertama, Peperangan bisa berhenti apabila telah tercapai tujuan perang yaitu menyerahnya pihak musuh dan *Kedua*, peperangan bisa berhenti karena adanya perjanjian.⁹² Perjanjian tersebut antara lain: *Pertama*, Perjanjian Sementara. *Kedua*, Perjanjian Abadi dan *Ketiga*, Perjanjian Keamanan.⁹³

Namun dalam suasa damai tersebut, Allah juga mengingatkan dan mengisyaratkan supaya umat Islam waspada dan tetap siaga, kalau perjanjian damai ini hanya menjadi siasat musuh untuk memukul kembali umat Islam. Apabila mereka melanggar isi perjanjian maka umat Islam harus bangkit melawan mereka yang mengkhianati perjanjian tersebut.⁹⁴

5. Tawanan Perang

Konsekuensi dari sebuah peperangan adalah tawanan perang yang berhasil ditangkap. Dalam Islam, tawanan perang adalah orang kafir atau musyrik yang dalam peperangan

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*, hal: 249

⁹³ *Ibid*, hal: 250, 251 dan, 253

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *op cit*, hal: 306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil ditangkap oleh tentara Islam. Dalam fiqh, tawanan perang ini dapat dikelompokkan menjadi *al-asra* dan *al-sabiyy*. *Al-Asra* adalah tawanan perang yang berasal dari tentara musuh yang ikut berperang melawan tentara Islam, sedangkan *al-sabiyy* adalah anak-anak dan wanita musyrik yang berhasil ditangkap oleh tentara Islam.⁹⁵

Islam memberikan tuntunan dalam memperlakukan tawanan perang ini. Islam mewajibkan umatnya untuk memperlakukan mereka secara baik dan kasih sayang. Dalam sejarah, Nabi tidak pernah memperlakukan tawanan perang dengan kasar, apalagi membunuhnya, kecuali karena hal-hal yang sangat prinsip, seperti tawanan perang tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*) atau sangat berbahaya kalau dibiarkan hidup sebagaimana yang Nabi contohkan dalam perang Badar.⁹⁶

Kalau tawanan perang tersebut merupakan pucuk pimpinan musuh yang sangat berpengaruh di kalangan kelompoknya atau sangat memusuhi Islam dan umatnya, atau mungkin akan berkhianat dan bisa jadi menyusun kembali strategi untuk memukul balik umat Islam maka mereka boleh dibunuh oleh pemerintah karena menimbang banyaknya mudharat yang ditimbulkan bilamana dibiarkan hidup. Apabila tawanan

⁹⁵ *Ibid*, hal: 306-307

⁹⁶ *Ibid*, hal: 307

perang tersebut hanyalah prajurit biasa yang ikut perang karena perintah komandan dan karena ketidakhendaknya terhadap Islam sedangkan sebenarnya dia tidak ingin memerangi Islam maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam namun apabila pemerintah Islam membutuhkan dana besar prajurit tersebut bisa dibebaskan dengan syarat meminta tebusan karena itu lebih bermanfaat bagi umat Islam.⁹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁷ *Ibid*, hal: 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaruh hegemoni barat bagi historis orde baru sangatlah nyata.

Bisa dilihat dari: Memulihkan hubungan diplomasi dengan Barat, Depolitisasi Indonesia, Penerapan Azas Tunggal Pancasila **Faktor Pendukung** masuknya hegemoni barat di Indonesia masa orde baru adalah dengan diterapkannya kekuasaan oligarki yang menghasilkan kebijakan depolitisasi yang sangat berpengaruh sekali selain itu pemulihan hubungan diplomatic dengan barat dan penerapan asas tunggal pancasila adalah hasil lanjutan dari kekuasaan oligarki tersebut. **Faktor Penghambat** masuknya hegemoni barat di Indonesia masa orde baru adalah menguatnya politik Islam masa itu terbukti dengan dibongsainya politik Islam dengan penyatuan partai, Islam diwadahi oleh PPP itu dengan tujuan supaya kekuatan dan kekuasaan mereka langgeng. Lagipula politik Islam dengan siyasahnya pasti sangat bertentangan dengan politik barat yang cenderung menghalalkan segala cara untuk berkuasa sehingga barat melalui pemerintahan orde baru sangat memperhatikan perkembangan politik Islam dan tokoh-tokoh dibalik itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan Siyasah maka ini telah melanggar dan tidak sesuai dengan salah satu kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tassaruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah

Tindakan Imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

Kaidah ini mengandung arti bahwa apa pun kebijaksanaan pemerintahan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif dalam implementasiannya. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau diri sendiri

Bentuk kemaslahatan yang dilanggar bisa dilihat dari bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dalam penerapannya sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar Negara malah direduksi, disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan, Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat. Sehingga pemerintah orde baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya, Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyaknya penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlandung di balik fungsi pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pancasila, Soeharto memimpin Negara dalam bentuk keotoriteran. Padahal Indonesia adalah Negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari dan oleh rakyat, Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitas, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbullah masalah SARA, Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Karena kritikan mengganggu ketidakstabilan Negara, Selama Orde Baru dalam kenyataannya Pancasila sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat.

B. SARAN

1. Saran saya bagi pemerintahan sekarang adalah untuk lebih mementingkan lagi kemaslahatan masyarakat bila pengaruh barat masuk maka akan merusak pola pikir, kebudayaan dan lain sebagainya, jadi kebijakan pemerintahan kedepannya harus lebih selektif dan lebih ketat dalam arus globalisasi ini.
2. Saran saya untuk masyarakat adalah memberikan kritik kepada pemerintah apabila itu telah melanggar kaidah dan tidak memberikan kemaslahatan kepada mereka pada masa arus globalisasi ini, masyarakat harus lebih selektif dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah terlebih lagi banyaknya masuk pengaruh barat maka akan mengancam ekstensi dan kebudayaan masyarakat akan terkikis dan memudar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abu Bakar, Anwar. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Adi, Rianto. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Al Banna, Hasan. 2018. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Terj. Anis Matta, Dkk. Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta Timur: Prenada Media
- Gramsci, Antonio. 2017. *Sejarah dan Budaya*, Terj. Ira Puspitonni. Yogyakarta: Narasi
- Haboddin, Muhtar & Muh Arjul. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Hardani. Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Herdiasnyah, Deden A. 2016. *Di Balik Runtuhnya Turki Utsmani*. Yogyakarta: Pro-U Media
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Kusumaningrum, Arin. 2019. *Awal Orde Baru*. Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas
- Maulani, Z.A. 2002. *Zionisme: Gerakan Menakhlukkan Dunia*. Jakarta: Daseta
- Patra, Nezar & Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Permana, Hedra. 2018. *Orde Baru*. Kalimantan Barat: Derwati Press
- Ramadhan, Muhammad, 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Perkalongan: PT Nasya Expanding Management
- Sembodo. M. 2009. *Pater Beek, Freemason dan CIA*. Galan
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Terj. Kamdani & Imam Baehaqi Yogyakarta: Insist
- Suggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Ed. 1
- Supoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Syamsul, Asep M. Romly. 2000. *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

Yahya Samantho, Ahmad. 2017. *Sejarah Jaringan Konspirasi Kejahatan Internasional Freemasonry Di Asia*. Bogor: Bayt al Hikmah Institute Bogor

Internet:

https://www.kompasiana.com/sosialis/hegemoni-orde-baru-dan-dinamika-konflik-di-era-reformasi_54f7101da333112a238b476f (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul. 10:00)

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/metode-ilmiah-pengertian-syarat-dan-tahapan-tahapannya-1918/> (Diakses pada tanggal 26 September 2020, pukul: 20:30)

<https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html> (Diakses pada tanggal 26 September 2020, pukul 21:00)

<https://nuun.id/melihat-barat-dengan-kaca-pembesar> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 21:23)

<https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1> (Diakses pada tanggal 4 Maret 2021. Pukul, 21:56)

<https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/orde-baru-mimpi-demokrasi-yang-kandas> (Diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Pukul. 21:00)

<https://www.bospedia.com/2018/05/orde-baru.html?m=1> (Diakses pada tanggal 12 April 2021, Pukul. 08:25)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2021, Pukul. 17:33)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/153239969/politik-luar-negeri-indonesia-masa-orde-baru> (Diakses pada tanggal 9 April, Pukul. 20:12)

<https://www.kitapunya.net/akibat-kelonggaran-pemerintahan-orde-baru/> (Diakses pada tanggal 9 April 2021, Pukul. 20:34)

<https://youthproactive.com/201409/speak-up/melawan-depolitisasi> (Diakses pada tanggal 9 April 2021, Pukul. 21:23)

<https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sistem-pemerintahan-pada-masa-orde-baru> (Diakses pada tanggal 12 April 2021, Pukul. 20:18)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru (Diakses pada tanggal 20 April 2021, Pukul. 22:04)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/25/153000169/penyimpangan-terhadap-pancasila-pada-masa-orde-baru?page=all> (Diakses pada tanggal 21 April 2021, Pukul. 21:00)

<https://saripedia.wordpress.com/tag/peradaban-barat/> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2021, Pukul 15:00)

Jurnal:

Agan Husaini. 2013. *Inquisisi Gereja: Noda Hitam Sejarah Barat*. Volume 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966-1998)**

yang ditulis oleh :

Nama : **RAJA ILHAM NUR ARIF**
 NIM : **11724102855**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 8 Juni 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring / Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Sekretaris

H. Syamsudin Muir, Lc, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Suhaib, M.Ag

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: RAJA ILHAM NUR ARIF

: 11627104340

: 11724102855

: HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH: STUDI HISTORIS POLITIK ERA ORDE BARU (1966-
1998)

Pembimbing: Dr. Arisman, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALHI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RAJA ILHAM NUR ARIF, Lahir di Tanjungbalai Karimun, Kepri pada tanggal 18 Juni 1999. Anak Tunggal dari pasangan Ayahanda Raja Abdul Hamid dan Ibunda Elvi Nuraini, S. Pd, SD. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak Aisyah lulus pada tahun 2005.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 007 Karimun lulus pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tebing lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Karimun lulus pada tahun 2017. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HEGEMONI BARAT DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH : STUDI HISTORIS POLITOK ERA ORDE BARU (1966-1998)”**. Lulus setelah dimunaqasyakan dengan IPK terakhir 3,85 (Cumlaude) pada tanggal 08 Juni 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.